



KR-Surya Adi Lesmana

PESONA KOTAGEDE: Seorang fotografer memotret dua orang berbusana adat Jawa di Kompleks Makam Raja-raja Mataram, Kotagede, Banguntapan, Bantul, Jumat (7/1). Pesona arsitektur kompleks ini membuat jatuh hati wisatawan sehingga menjadikannya sebagai destinasi favorit sekaligus lokasi berfoto jelang pernikahan.

KORIDOR NORMA BARU PERILAKU WARGA

Komnas HAM Desak Sahkan RUU TPKS

JAKARTA (KR) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendesak pemerintah segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) menjadi Undang-Undang.

"Jika RUU TPKS ini sudah disahkan jadi undang-undang, akan menjadi tolok ukur bertindak oleh aparaturnya," kata Wakil Ketua Komnas HAM Amiruddin di Jakarta, Jumat (7/1).

Selain itu, dengan disahkannya RUU TPKS menjadi produk undang-undang sekaligus berfungsi sebagai koridor norma baru bagi perilaku warga negara di Tanah Air, kata Amiruddin. "Ini demi perlindungan HAM perempuan Indonesia. Komnas HAM mendesak RUU TPKS agar segera disahkan," ujar Amiruddin.

Ia berpendapat, jika RUU TPKS terus ditunda, sama halnya semua pihak bersikap abai atas perlindungan perempuan dan anak di Indonesia. Desakan yang disampaikan Komnas HAM tidak lepas dari berbagai kasus kekerasan seksual di Tanah Air terutama yang terjadi di lingkungan pondok pesantren dan kampus. Sebagai contoh peristiwa yang terkuak di Bandung.

Dalam kejadian itu seorang pemilik asrama pondok pesantren menjadi pelaku kekerasan seksual. Bahkan, perbuatan pejabat pelaku sudah berlangsung selama

bertahun-tahun. Diketahui sebanyak 12 anak perempuan menjadi korban dimana delapan di antaranya sampai hamil.

Merebaknya peristiwa kekerasan seksual seperti yang terjadi di Bandung seperti ini bukan saja karena kejahatannya pelaku. Namun, juga bisa terjadi karena sikap abai masyarakat hingga aktor-aktor negara dan pemerintah.

Jika RUU TPKS sudah disahkan menjadi undang-undang, katanya, maka penghormatan dan perlindungan HAM warga negara terutama perempuan bisa lebih ditingkatkan oleh negara.

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengingatkan pembahasan RUU TPKS yang disesalkan untuk dipercepat sejumlah kalangan, jangan sampai mengabaikan kepastian hukum dan perlindungan bagi korban. "RUU

TPKS yang saat ini masih menunggu proses diajukan ke rapat paripurna untuk disepakati sebagai RUU inisiatif DPR, memang memuat aturan yang menyeluruh dalam penanganan kasus kekerasan seksual," kata Lestari Moerdijat.

Ia menilai komitmen sejumlah pihak untuk mempercepat pembahasan RUU TPKS, harus tetap berpegang pada tujuan, bahwa produk UU yang dihasilkan mampu menjadi dasar bagi para penegak hukum untuk menangani kasus-kasus tindak pidana kekerasan seksual secara komprehensif.

Menurutnya, setidaknya dalam RUU TPKS memuat sejumlah aspek yang diatur, antara lain terkait sanksi dan tindakan, hukum acara, hak-hak korban, pencegahan, rehabilitasi, dan pengawasan. (Ful)-f

KASUS WALIKOTA BEKASI KPK Geledah di Sejumlah Lokasi

JAKARTA (KR) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah beberapa lokasi di Kota Bekasi terkait kasus dugaan korupsi pengadaan barang, jasa dan lelang jabatan yang melibatkan Walikota Bekasi Rahmat Effendi (RE).

"Benar, hari ini (kemarin) tim penyidik KPK melakukan kegiatan upaya paksa pengeledahan di beberapa lokasi di antaranya berada di wilayah Kota Bekasi," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangan tertulisnya, Jumat (7/1) di Jakarta.

Pengeledahan tersebut, jelas Ali, dilakukan untuk menemukan, mengumpulkan, dan mengamankan bukti-bukti yang diduga

berkaitan dengan perkara.

Seperti diketahui, Kamis (6/1), KPK telah menetapkan Rahmat Effendi (RE) dan delapan orang lain sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah yang dilakukan penyelenggara negara terkait pengadaan barang, jasa dan lelang jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

Delapan orang tersangka, yakni Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan PTSP M Bunyamin (MB), Lurah Jati Sari Mulyadi (MY), Camat Jatisampurna Wahyudin (WY), serta Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Bekasi Jumhana Lutfi (JL). (Ful)-f

ANJLOKNYA INDEKS KEBAHAGIAAN DIY

Tak Perlu Ubah Kebijakan Mendasar

YOGYA (KR) - Anjloknya peringkat indeks kebahagiaan DIY menjadi perhatian pimpinan DPRD DIY. Namun demikian, penurunan indeks merupakan kewajaran sebagai dampak gelombang pandemi Covid-19 yang berlarut-larut, sehingga sangat dirasakan warga DIY di segala lapisan.

"Jika saat pandemi warga bahagia justru aneh," ujar Wakil Ketua DPRD DIY, Huda Tri Yudianta kepada KR, menanggapi penurunan indeks kebahagiaan DIY, Jumat (7/1).

Belum lama ini, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis laporan Indeks Kebahagiaan 2021. Dalam rilis tersebut DIY menjadi satu dari sepuluh provinsi di Indonesia yang mengalami penurunan peringkat indeks kebahagiaan. Bahkan dari 34 provinsi, DIY yang sebelumnya berada di peringkat pertama turun drastis ke posisi 22.

Penghitungan ini dihasilkan dari survei yang dilakukan pada 1 Juli sampai 27 Agustus 2021 terhadap

75.000 rumah tangga yang dipilih secara acak dengan pendekatan kepuasan hidup, afeksi (perasaan), dan makna hidup. Adanya penurunan peringkat tersebut akan menjadi bahan evaluasi Pemda ke depan.

Menurut Huda, waktu pengambilan data survei tentu sangat berpengaruh terhadap hasilnya. Ini survei diambil dari tanggal 1 Juli sd 22 Agustus 2021 di mana saat itu DIY sedang terjadi puncak kasus Covid-19. Ribuan warga terdampak, ratusan warga meninggal. Itu adalah hari-hari tragedi yang sangat menyedihkan bagi semua warga DIY. Saat itu semua berkabung dan bergotong-royong mengatasi pandemi Covid-19.

Karena itu, kata Huda, saat pengambilan data pada kondisi dalam keadaan kepedihan luar biasa, justru sangat aneh jika warga bahagia. "Kalau sekarang diambil sample tentu lain hasilnya," ujar anggota Fraksi PKS.

Meski demikian, hasil survei BPS

ini bisa sebagai evaluasi. Tetapi DIY, belum perlu melakukan perubahan terhadap berbagai kebijakan mendasar karena survei nya dilakukan pada kondisi luar biasa

"Kalau survei dalam kondisi normal bolehlah kita pertimbangkan dengan perubahan kebijakan," ujarnya.

Sebelumnya, Sekda DIY K Baskara Aji akan menyikapi hasil survei BPS tersebut. Yakni akan mencari tahu indikator-indikator apa yang berubah. "Apabila nantinya ada indikator yang bisa kita tingkatkan akan kami perbaiki," kata Aji.

Diungkapkan, pandemi Covid-19 telah mengakibatkan banyak perubahan dalam berbagai aspek kehidupan. Penambahan kasus positif yang signifikan di DIY yang sempat terjadi di DIY serta pembatasan mobilitas masyarakat yang berdampak pada perekonomian warga dimungkinkan menjadi penyebab menurunnya kepuasan warga pada kinerja pemerintah setempat. (Jon)-f

MENAG 'SOWAN' KETUM PB NU

Bangun Kemitraan Ormas Keagamaan

JAKARTA (KR) - Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas hari ini bersilaturahmi ke Kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Jalan Kramat Raya, Jakarta. Kehadiran Menag diterima Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf.

Pertemuan Menag Yaqut berlangsung hangat di ruang kerja Ketum PBNU. Hadir mendampingi, para Staf Khusus Menteri Agama, yakni Wibowo Prasetyo, Mohammad Nuruzzaman, dan Abdul Qodir.

"Alhamdulillah, saya barusan sowan ke Ketum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf. Kami berdiskusi dalam ikhtiar untuk bersinergi dalam merawat kerukunan dan meningkatkan kualitas kehidupan keagamaan di Indonesia," terang Gus Yaqut, sapaan akrab Menag, di Jakarta, Jumat (7/1). "Saya berkomitmen untuk terus membangun kemitraan konstruktif dengan ormas keagamaan," sambungnya.

Menurut Menag, pemerintah akan mencanangkan tahun 2022 sebagai tahun toleransi. Kerukunan dan toleransi masyarakat Indonesia dikagumi berbagai negara. Menag mencontohkan Majelis Hukama Al-Muslimin, organisasi independen yang beranggotakan cendekiawan Muslim dari berbagai dunia dan berpusat di Abu Dhabi- Uni Emirat Arab, telah berkinerja untuk menyampaikan keinginannya belajar tentang toleransi masyarakat Indonesia. "Sudah saatnya toleransi Indonesia menjadi barometer masyarakat dunia. Narasi tentang toleransi di Indonesia perlu digaungkan agar dipahami masyarakat dunia," sebut Yaqut. (Ati)-d

TOLAK ANAKNYA DIVAKSIN

Orangtua Perlu Lebih Dipahamkan

YOGYA (KR) - Adanya sejumlah orangtua di Kabupaten Kulonprogo yang menolak anaknya untuk vaksinasi Covid-19, diperkirakan karena mereka belum mendapatkan pemahaman secara menyeluruh mengenai vaksinasi untuk anak-anak. Karena selama ini pelaksanaan vaksinasi di DIY mayoritas berlangsung lancar dan tidak ada masalah.

Manfaat vaksinasi untuk menekan jumlah kasus juga tidak perlu diragukan lagi. Sebab jumlah kasus harian di DIY dalam beberapa waktu terakhir sudah mulai menurun, seiring semakin banyaknya warga yang sudah divaksinasi, di samping kesadaran masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan.

"Selama ini pelaksanaan vaksinasi di DIY berlangsung lancar dan tidak ada masalah. Soal adanya kekhawatiran terkait munculnya kejadian ikutan pascaimunisasi (KIPI), dapat diatasi selama dua atau tiga hari. Selain itu, vaksin terbukti memberikan manfaat. Selain penurunan jumlah kasus, seandainya ada orang yang terpapar biasanya jika sudah divaksin tidak terlalu parah. Untuk itu saya berharap orangtua yang memiliki anak usia SD atau SMP sebaiknya anaknya diikutkan vaksinasi seperti anak-anak yang lain," kata Sekda DIY Drs K Baskara Aji MM di Kepatihan, Yogyakarta, Jumat (7/1).

Baskara Aji menyatakan, supaya tidak ada kesalahan pemahaman soal vaksinasi, Disdikpora dan Dinas Kesehatan DIY akan rapat untuk lebih mensosialisasikan kepada masyarakat agar bisa sukarela dan tidak ada paksaan saat menjalani vaksinasi. (Ria/Ira)-f

UNTUK JATUHKAN LAWAN POLITIK

Kampanye Hitam Tak Sesuai Semangat Demokrasi

JAKARTA (KR) - Direktur Eksekutif Lembaga Survei Kedai Kopi sekaligus pengamat politik Kunto Adi Wibowo menyarankan agar tidak menggunakan instrumen *black campaign* (kampanye hitam) untuk menjatuhkan lawan politik pada persaingan Pilpres 2024, karena tidak sesuai semangat demokrasi.

Kunto menyampaikan pernyataan tersebut dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat (7/1), ketika menanggapi isu dilaporkannya politik Partai Golkar berinisial AH oleh Rifa Handayani ke Mabes Polri. Rifa melaporkan AH terkait dengan isu perselingkuhan.

Kunto mengatakan, etika politik harus tetap dijaga, yaitu dengan cara tidak menggunakan kampanye hitam untuk menjatuhkan lawan politik. Karena, kampanye hitam sangat tidak sesuai semangat demokrasi. "Kampanye hitam merusak kemampuan memilih untuk bisa melihat isu penting yang sebenarnya dan lebih fokus kepada isu-isu yang sebenarnya hanya diciptakan sementara untuk mengganggu reputasi seseorang," papar Kunto,

seperti dilansir Antara.

Pengamat politik dari Universitas Padjadjaran (Unpad) ini mengakui, isu perselingkuhan memang bisa memengaruhi peta politik, termasuk akan menjadi sandungan bagi AH dalam persaingan politik di Pilpres 2024.

"Tentu ini pasti akan memengaruhi politik secara keseluruhan dari pencalonan AH. Tinggal seberapa besar isu ini meledak di masyarakat dan dari survei apa akan berpengaruh terhadap elektabilitasnya," urai Kunto.

Kunto mengingatkan, isu perselingkuhan memang bisa menjegal seseorang. Bagaimanapun, isu perselingkuhan merupakan yang paling merusak citra dan reputasi politikus.

Apakah isu tersebut sebagai kampanye hitam? Kunto mengatakan, jika tidak terbukti, isu tersebut merupakan kampanye hitam. Namun, kalau isu perselingkuhan tersebut terbukti, isu ini merupakan kampanye negatif. "Dalam politik, *negative campaign* (kampanye negatif) bisa saja, biarpun masyarakat kita masih menganggapnya tidak etis," ungkap Kunto. (Obi)-f

DEWAN PERS INGATKAN POLRI

Bijak Melihat Perkembangan Media

JAKARTA (KR) - Dewan Pers mengingatkan Polri lebih bijaksana dalam melihat perkembangan media terutama di era saat ini, di mana kebebasan pers dilindungi oleh undang-undang.

"Jadi, kalau ada kritik, maka kritik itu harus dianggap sebagai sebuah masukan dari partner. Media sebagai partner," kata Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers Arif Zulkifli dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat (7/1).

Arif mengajak Divisi Humas Polri untuk mengedepankan dialog dalam menyikapi sebuah produk jurnalistik yang diliput awak media. Sebagai contoh, kasus wartawan Tempo Nurhadi yang mendapat penganiayaan saat melakukan tugas jurnalistik.

Menurut Arif, kasus tersebut kini telah bergulir ke pengadilan, diharapkan tidak ada lagi kriminalisasi terhadap jurnalis. "Untuk kasus Nurhadi, saya kira respons polisi sangat baik, saya apresiasi kasus sudah masuk pengadilan, tinggal kita pantau dan monitor bersama supaya keadilan tercapai dan peristiwa ini tidak terulang lagi," tegasnya.

Divisi Humas Polri mengundang Dewan Pers dalam acara peningkatan kompetensi SDM Divisi Humas Polri dan juga Kabid Humas jajaran seluruh Indonesia. Pertemuan berlangsung secara virtual melalui platform "zoom meeting". Dewan Pers menyampaikan tentang bagaimana seharusnya wartawan bekerja mematuhi kode etik mengikuti segala aturan.

"Tapi di sisi lain kita juga berdiskusi tentang bagaimana teman Divisi Humas Polri harus merespons perkembangan media massa yang ada selama ini," kata Arif.

Menurut Dewan Pers, saat ini media massa di Tanah Air jumlahnya banyak, ada yang sudah mengikuti kode etik, tapi ada juga yang belum. Perbedaan ini, lanjut Arif, harus disikapi, sehingga Divisi Humas Polri harus bersinergi guna tercapainya penyampaian informasi yang baik dan benar.

"Jadi masih berbeda-beda pandangannya dan bagaimana kita semua bisa bersinergi menyajikan berita-berita yang bagus, yang kritis, tapi pada saat yang sama di humas bisa mengelola informasi-informasi itu dengan baik, sesuai kepentingan institusi," kata Arif. (Ant)-d

MASUK REKOR MURI

Semprot Eco Enzyme dengan 50.000 Sprayer

KLATEN (KR) - Penyemprotan eco enzyme ke udara serentak menggunakan 50.000 sprayer di Kabupaten Klaten, masuk rekor MURI. Penyerahan piagam penghargaan dilakukan Representatif Rekor MURI Sri Widayati kepada Bupati Klaten Sri Mulyani didampingi Koordinator Relawan Satgas Covid-19 Klaten Purwanto Anggono Cipto dan perwakilan relawan di Alun-alun Klaten, Jumat (7/1).

Purwanto Anggono Cipto mengatakan, penyemprotan eco enzyme ke udara serentak dengan 50.000 sprayer ini untuk memasyarakatkan eco enzyme ke masyarakat. Dengan eco enzyme dapat mengurangi risiko bencana, karena dapat meningkatkan kualitas udara dan air.

Peserta penyemprotan



KR-Sri Warsiti

Bupati Klaten dan para relawan menyemprotkan eco enzyme di Alun-alun Klaten.

eco enzyme melibatkan jajaran TNI, Polri, seluruh relawan Klaten, OPD di Kabupaten Klaten, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa dan Kelurahan sampai tingkat RW dan RT. Juga melibatkan SD, SMP, SMA dan SMK, Perguruan Tinggi serta masyarakat umum.

Sri Mulyani mengajak masyarakat untuk membudayakan pemakaian eco enzyme dalam kehidupan sehari-hari, karena selain ramah lingkungan juga pembuatannya cukup mudah. Dengan eco enzyme juga dapat mewujudkan kebersihan lingkungan.

(Sit)-d